



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL

2015 s.d. 2019



Daftar Isi

Bagian I: Ringkasan Eksekutif	1
Bagian II: Pendahuluan	4
A. Peranan Komisi Yudisial	4
B. Kondisi Objektif dan Masalah yang Dihadapi	5
C. Upaya Pembenaan Yang Telah Dilakukan	6
D. Quick Wins	8
E. Langkah-Langkah Reformasi yang Akan Dilakukan	14
- Arah Kebijakan	14
- Strategi	15
- Arah Pengembangan Periode 2015 s.d. 2019	18
Bagian III: Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi	22
Bagian IV: Penutup	51
Lampiran Rencana Aksi	



Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Churchill)



BAGIAN SATU

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berlandaskan konstitusi yang diorientasikan untuk membangun *system checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitusional yaitu, untuk melakukan seleksi calon hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Melalui dua kewenangan konstitusional tersebut, Komisi Yudisial diharapkan dapat berperan penting dalam upaya membangun dan mewujudkan peradilan bersih, karena meskipun kekuasaan kehakiman sejatinya bersifat independen tapi bukan berarti lepas dari fungsi pengawasan dari pihak eksternal.

Dalam mengemban amanat konstitusi itulah Komisi Yudisial telah berusaha menerapkan reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2012 dengan 8 area perubahan sesuai dengan peraturan Kementerian PAN dan RB yang mencakup Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penataan Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Pada tanggal 21 Februari 2013 untuk pertama kalinya Kementerian PAN & RB menyampaikan hasil penilaian kesiapan RB Komisi Yudisial yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen usulan mencapai 76% dan *road map* mencapai 85%. Terkait untuk verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan kesiapan RB Komisi Yudisial mendapat nilai 35. Kemudian untuk nilai akhir penilaian pelaksanaan RB adalah 33 (level 2) dengan usulan besaran tunjangan 40% dari tunjangan kinerja Kementerian Keuangan yang ditandai dengan Peraturan Presiden No 115 tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan RB, Komisi Yudisial telah melakukan banyak perbaikan baik di lingkup internal ataupun eksternal. Untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur, Komisi Yudisial membangun jaringan untuk akses langsung ke internet guna memudahkan pencarian data/informasi dan komunikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh aparatur. Pada tahun 2012 Komisi Yudisial meredefinisi visi, dan misi sebagai pedoman kerja sebagaimana termuat dalam Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial 2012 – 2016. Komisi Yudisial telah membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang merupakan *data base* kepegawaian sebagai dasar perencanaan karir pegawai, mengembangkan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan implementasi *e-government*, dan secara terus menerus mengembangkan *website* Komisi Yudisial agar menjadi *website* yang dinamis dan informatif. Komisi Yudisial terus menerus melakukan pembaharuan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), menyusun Renstra Komisi Yudisial, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan secara berkala memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai sesuai dengan kompetensi. Dari sisi pengelolaan keuangan Komisi Yudisial telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, sehingga sejak tahun 2007 berturut-turut sampai dengan tahun 2014 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial.

Terkait pembenahan eksternal Komisi Yudisial telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial juga bekerja sama dan membangun jejaring di berbagai kalangan, baik dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa keagamaan, maupun organisasi kepemudaan dan mahasiswa.

Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial bertujuan untuk membangun manajemen SDM berbasis IT, restrukturisasi organisasi dan merubah orientasi pegawai, mewujudkan anggaran berbasis kinerja, dan mendorong kompetensi dan kualitas hasil. Komisi Yudisial akan melaksanakan banyak pembaharuan guna mewujudkan reformasi birokrasi antara lain penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan tatalaksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, manajemen perubahan, monitoring dan evaluasi.



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

Selain dari perbaikan sistem di internal Komisi Yudisial, Komisi Yudisial membangun kepercayaan masyarakat dengan menjalankan program percepatan (*quick wins*) yaitu (1) Percepatan penanganan laporan pengaduan dengan jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) hari kerja dari sejak registrasi., (2) Penyediaan database hakim agung, hakim adhoc di Mahkamah Agung dan hakim yang lengkap dan akurat , (3) Penyediaan akses informasi langsung terkait tugas utama Komisi Yudisial pada bidang pencegahan maupun penegakan atau informasi lainnya secara cepat dan akurat berbasis TIK

Posisi Komisi Yudisial yang kini semakin diperhatikan dan dipercaya oleh masyarakat merupakan hal yang mendasari perbaikan Komisi Yudisial dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan melakukan berbagai pembenahan dan pembaharuan sistem yang telah ada. Komisi Yudisial menyadari bahwa untuk mencapai peningkatan penilaian reformasi birokrasi tentulah bukan proses yang mudah, dibutuhkan usaha yang serius, terencana, dan berkelanjutan serta mampu menyentuh akar masalah dari birokrasi sehingga bisa merubah budaya organisasi demi terwujudnya reformasi birokrasi Komisi Yudisial itu sendiri.



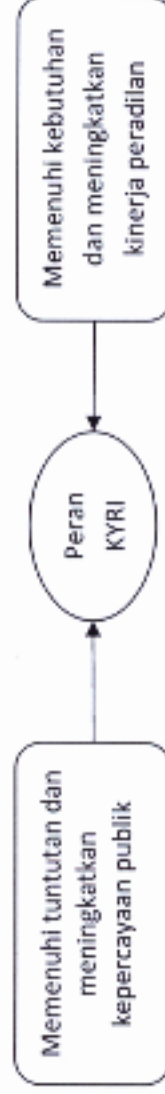
BAGIAN DUA

PENDAHULUAN

A. Peranan Komisi Yudisial

Kelahiran Komisi Yudisial yang merupakan harapan untuk mewujudkan sistem *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman yang independen, karena sejatinya kekuasaan kehakiman khususnya peradilan yang bersih dan independen tidak akan terwujud tanpa adanya pengawasan dari pihak eksternal. Komisi Yudisial sesuai dengan amanat Pasal 24 B UUD Tahun 1945 melaksanakan kewenangan menyeleksi calon hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran serta martabat hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial melakukan pengawasan dengan dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang bersih sebagaimana cikal bakal lahirnya lembaga ini. Pengawasan terhadap peradilan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial saat ini diorientasikan untuk memastikan bahwa hakim sebagai pelaksana utama fungsi peradilan akan berintegritas, jujur dan profesional sehingga dipercaya masyarakat.

Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dimulai dari rendahnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan sampai pada kebutuhan kinerja lembaga peradilan sendiri untuk fokus pada hal-hal teknis perkara bukan pada perkara non-teknis. Sehingga peran strategis Komisi Yudisial bisa digambarkan berada pada tengah-tengah dua hal tersebut, seperti pada diagram dibawah ini:





ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

Komisi Yudisial idealnya diposisikan sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman. Dimana posisi tersebut membawa konsekuensi pada peran yang menyeluruh dalam urusan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial sebagai penyeimbang adalah konsep yang akhirnya turun dalam bentuk fungsi pengawasan yang berkaitan dengan kinerja dan kedisiplinan para hakim sebagai aktor utama di lingkungan peradilan.

B. Kondisi Objektif dan Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial untuk mewujudkan Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam rangka menjadikan hakim bersih, jujur, dan profesional, sebagaimana visi Komisi Yudisial, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial di bidang pencegahan dan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung;
3. Fungsi teknis dan fungsi *supporting* diemban di Kesekjenan, sehingga membuat fungsi teknis menjadi tidak optimal;
4. Perencanaan dan pengembangan SDM belum efektif;
5. Belum adanya mekanisme kerja pimpinan yang diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja;
6. Sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Komisi Yudisial belum memadai;
7. Lemahnya pengelolaan/*management issue*;
8. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan masih rendah (Komisi Yudisial melakukan advokasi dan *Judicial Education*);
9. Masyarakat belum menghargai profesi hakim secara proporsional;



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

10. Tidak semua Bakal calon hakim agung potensial tertarik menjadi CHA;
11. Rekomendasi sanksi kode etik Komisi Yudisial belum sepenuhnya diimplementasikan;

C. Upaya Pembenhahan yang Telah Dilakukan

Berbagai permasalahan yang dihadapi Komisi Yudisial pada akhirnya mengharuskan Komisi Yudisial meningkatkan kinerjanya guna lebih optimalnya pelaksanaan wewenang dan tugas-tugas Komisi Yudisial yang diamanatkan konstitusi dan Undang-Undang. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan wewenang dan tugasnya dengan melakukan reformasi birokrasi. Dengan reformasi ini, Komisi Yudisial dapat membangun profil dan perilaku aparatur Komisi Yudisial yang profesional, berintegritas dan amanah sehingga mampu mewujudkan Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam rangka menjadikan hakim bersih, jujur, dan profesional guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya, yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, telah diterjemahkan dalam berbagai kebijakan dan pelaksanaan program kerja, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan.
 - Penyediaan sistem informasi yang cepat, akurat dan transparan dan efisien (1) terkait akses informasi masyarakat pencari keadilan yaitu status pengaduan Komisi Yudisial dan pengaduan online Komisi Yudisial serta masyarakat umum lainnya yaitu sistem pelayanan informasi publik online dan perpustakaan online (2) terkait rekrutmen calon hakim agung yaitu pendaftaran online CHA (3) terkait peningkatan kapasitas hakim yaitu *e-learning* bagi seluruh hakim di Indonesia.
2. Peningkatan Kinerja Pegawai, disiplin aparatur, penerapan standar kinerja individu.



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

- Opini BPK terhadap Komisi Yudisial yang memperoleh predikat "wajar tanpa pengecualian" atas laporan keuangan Komisi Yudisial
- Penilaian terhadap Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) memperoleh nilai CC tahun 2014.
- Memperoleh juara pertama kategori utilisasi Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2013 untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang sampai dengan 10 satuan kerja.
- Meningkatkan kapasitas SDM Komisi Yudisial dengan cara menyelenggarakan maupun mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis sesuai dengan kompetensi. Berbagai diklat yang sudah berjalan antara lain diklat anotasi, investigasi legal drafting, teknologi informasi, jurnalistik, serta diklat yang khusus ditujukan untuk struktural Komisi Yudisial. Adapun jumlah SDM Komisi Yudisial sampai dengan 2014, sebagaimana tabel dibawah ini:

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA KOMISI YUDISIAL

UNIT KERJA	PEJ. NGR	STRUKTURAL				Fungsional Tertentu		FUNGSIONAL UMUM		PTT	Pengawal /Ajudan	Tenaga bantuan Dokter	JML
		ES I	ES II	ES III	ES IV	Adm	Teknis						
KOMISIONER	7												7
SEKRETARIAT JENDERAL		1											1
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim			1	2	4				20				27
Biro Pengawasan Perilaku Hakim			1	2	7			2	42	1			55
Biro Investigasi			1	2	4			1	23				31



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

Biro Perencanaan dan Kepatuhuan Internal	1	2	3	12	18							
Biro Umum	1	4	8	2	37	2	5	1	60			
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	1	2	1	1	18	1			24			
Tenaga Ahli						15			15			
Penghubung						40			40			
JUMLAH	7	1	6	14	27	3	70	85	59	5	1	278

D. Quick Wins

Quick wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan MenPan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, *quick wins* memiliki kriteria sebagai berikut:

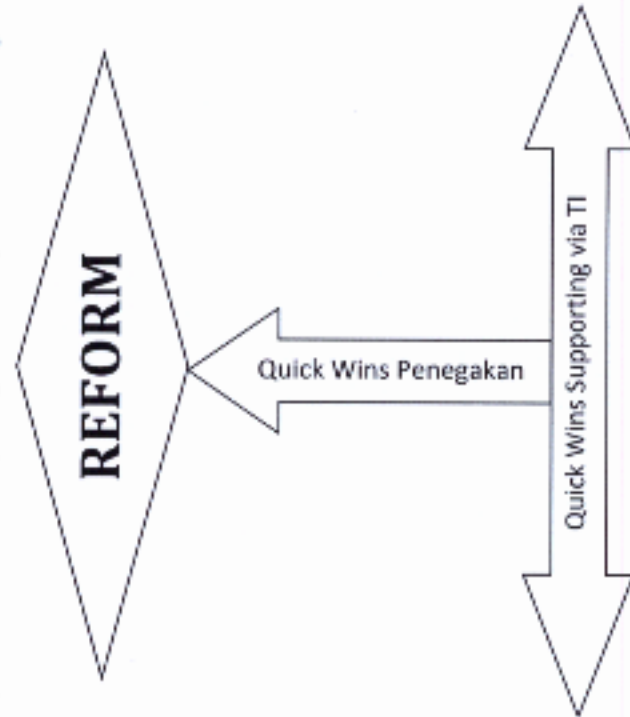
- dilakukan di awal;
- sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama K/L dan Pemda dalam hal output atau tingkat kinerja;
- dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat, kurang lebih 12 bulan;
- mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh stakeholders;
- memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi;
- memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama K/L dan Pemda

Dalam lingkup Komisi Yudisial RI maka program *quick wins* yang dijalankan harus memiliki kaitan erat dengan dua fungsi utama Komisi Yudisial dalam bidang pencegahan maupun penegakan, selain itu ditambah lagi dengan satu program *quick wins*



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

berupa otomatisasi seluruh kegiatan pelayanan yang berfungsi sebagai *supporting* dua program *quick wins* yang utama. Logika yang coba dibangun dalam pelaksanaan *quick win* tersebut dapat digambarkan pada skema sebagai berikut:



Konstruksi berpikir di atas disesuaikan juga dengan penjelasan Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Instansional Bab V Buku Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dimana *quick wins* yang dimaksud adalah program percepatan yang sejalan dengan bidang tugas utamanya, terutama berkaitan dengan pelayanan publik sehingga perubahannya dapat segera dirasakan. Merujuk pada keterangan yang diberikan oleh Narasumber dari MenPAN pada forum Raker Komisi Yudisial RI Tgl 27 Februari 2015 dimana definisi publik disini tidak selalu berarti masyarakat secara umum, namun publik yang dimaksud adalah "pihak yang



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

dilayani atau dikenakan pelayanan", maka begitu juga dengan sasaran program quick win yang dicanangkan oleh Komisi Yudisial dimana target yang dituju bukan hanya masyarakat tetapi juga profesi Hakim yang bisa dikategorikan sebagai "publik" yang dilayani oleh Komisi Yudisial.

Quick wins sebaiknya lahir bukan hanya karena inisiatif lembaga tetapi ia juga lahir karena kebutuhan serta manfaat yang besar yang dihasilkannya. Oleh karena itu basis argumentasi yang dijadikan dasar dalam menentukan quick wins paling tepat jika diakomodir dari masukan para stakeholder.

Berdasarkan hasil pengukuran respon publik terhadap pelayanan yang diberikan KY dalam hal pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Hakim melalui *Focus Group Discussion* yang diikuti oleh peserta dengan pengalaman langsung sebagai pelapor. Beberapa issue penting mengemuka yang akhirnya mengerucut menjadi formulasi yang terkait dengan ruang lingkup, tahapan, permasalahan, dan prioritas tindak lanjut di seputar pelayanan KY, antara lain:

No.	Ruang Lingkup	Tahapan	Permasalahan	Rekomendasi	Prioritas Tindak Lanjut
1.	Persyaratan	Pendaftaran	syarat yang memberatkan, yaitu mengharuskan pelapor menyertakan dokumen salinan asli.	Perlu ada kajian lebih mendalam perihal urgensi salinan asli dijadikan sebagai persyaratan	Cukup penting
		Klarifikasi	Beban pembuktian untuk melengkapi bukti yang berada pada pelapor	Beban untuk melengkapi bukti dialihkan kepada KY	
2.	Prosedur	Pendaftaran	Tidak berimbanganya Komisioner dalam menangani pendaftaran, antara laporan terkait perkara yang menyita perhatian publik dan yang tidak mendapat perhatian publik	Adanya ukuran yang jelas untuk menentukan penanganan laporan yang ditangani langsung oleh Komisioner atau didelegasikan kepada Kesekjenan	Cukup penting
		Pemeriksaan	Terbatasnya pelibatan pelapor dalam proses pemeriksaan	mengadakan pertemuan atau forum yang melibatkan semua pihak, baik pelapor maupun terlapor.	


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

No.	Ruang Lingkup	Tahapan	Permasalahan	Rekomendasi	Prioritas Tindak Lanjut
		Pemberitahuan	Substansi pemberitahuan hanya yang terkait dengan pelapor, sedangkan apa yang menyangkut terlapor tidak disampaikan kepada pelapor.	Pemeriksaan dilakukan dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi.	Penting
		Umum	Prosedur yang berbelit atau birokratis	Melakukan kajian atas urgensi pemberian informasi mengenai terlapor kepada pelapor	Cukup Penting
			minimnya pengetahuan dari masyarakat di daerah perihal prosedur dari laporan pengaduan perilaku hakim kepada KY	Memanfaatkan website untuk sarana pemberitahuan kepada pelapor maupun masyarakat secara umum akan berkembang suatu laporan.	Cukup penting
			periode waktu pemberitahuan perkembangan laporan yang tidak berkala dan tidak intensif	Membangun sistem yang lebih singkat dan efektif	Penting
3.	Waktu	Pemberitahuan	Waktu proses penanganan yang lama terutama pasca tahapan klarifikasi	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah	Penting
		Umum	Penyelesaian proses laporan yang melebihi proses persidangan	Memaksimalkan peran dari kantor penghubung KY	Penting
			Pelapor hanya mendapatkan petikan keputusan pleno yang tidak mencantumkan argumentasi dari amar keputusan	Membentuk sistem pemberitahuan perkembangan laporan secara berkala kepada pelapor dengan isi informasi yang lebih detail dan frekuensi yang lebih sering	Sangat penting
				Membentuk mekanisme penanganan proses laporan yang lebih singkat	Sangat penting
4.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Umum		Membuat sistem prioritas untuk perkara yang sudah masuk dalam tahapan akhir persidangan	Sangat penting
				Melakukan kajian terkait dengan urgensi pemberian salinan keputusan kepada pelapor	Sangat Penting


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

No.	Ruang Lingkup	Tahapan	Permasalahan	Rekomendasi	Prioritas Tindak Lanjut
5.	Kompetensi Pelaksana	Klarifikasi	Petugas tidak menguasai informasi mengenai perkembangan proses laporan	Membangun sistem data base perkembangan proses laporan yang dapat diakses oleh petugas	Cukup Penting
		Pemeriksaan	Petugas kurang memiliki kemampuan untuk menggali fakta dari pelapor dan terlapor	Mengadakan pelatihan dan meningkatkan peran dari petugas pemeriksa	
6.	Perilaku Pelaksana	Pendaftaran	Petugas tidak proaktif dalam membantu pelapor membuat laporan	Memberikan pelatihan kepada petugas untuk memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam membuat laporan	Cukup Penting
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengajuan Keberatan	Pelapor lebih memilih untuk tidak mengajukan keberatan karena ada kekhawatiran proses akan lebih lama	Membangun mekanisme yang lebih jelas dan terukur dalam menerima dan menangani keberatan	Sangat Penting

Sementara dari sisi pencegahan, agar pelaksanaan fungsi pencegahan berjalan dengan optimal terdapat kebutuhan dasar mengenai adanya database hakim yang lengkap dan akurat yang meliputi:

1. daftar riwayat hidup (yang memuat identitas hakim dan keluarga, pendidikan formal dan non-formal, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama menjabat sebagai hakim);
2. riwayat jabatan meliputi: promosi, mutasi, dan rotasi;
3. hasil evaluasi pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh KY;
4. catatan laporan pengaduan masyarakat yang pernah dilaporkan ke KY;
5. Hukuman dan penghargaan yang pernah diterima;
6. Hasil penelusuran rekam jejak;
7. hasil analisa putusan hakim.



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

Dengan adanya database yang lengkap dan akurat sebagaimana memuat tersebut di atas dapat mendukung optimalisasi pencapaian kinerja lembaga KY, karena dapat mengembangkan sistem informasi yang menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi; Meningkatkan kualitas layanan data dan informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas.

Misal dalam rangka rekrutmen calon hakim agung, dengan adanya database yang lengkap dan akurat, KY mengetahui rekam jejak hakim yang bersangkutan sejak masih bertugas di pengadilan tingkat pertama sampai dengan di pengadilan tingkat banding, sehingga KY sudah mempunyai bank calon-calon yang kompeten dan berpotensi baik secara integritas dan kualitas untuk direkomendasikan sebagai calon hakim agung.

Dalam upaya peningkatan kapasitas hakim, KY dapat memanfaatkan database sebagai *training need analysis* terhadap hakim sehingga dapat memberikan pelatihan yang memang dibutuhkan oleh hakim untuk meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, dengan database tersebut terdapat upaya pemerataan pelatihan yang diterima oleh hakim. Serta memudahkan mengevaluasi hasil peningkatan kapasitas hakim yang telah diselenggarakan oleh KY.

Dengan database KY dapat memotret penyebaran penempatan hakim, mengetahui hakim yang berprestasi sehingga dapat merekomendasikan promosi, mutasi, dan rotasi *the right man in the right place*.

Dengan beberapa argumentasi di atas, oleh karenanya dalam rangka merespon tuntutan publik terkait dengan pelayanan pengadilan sebagaimana mengemuka dalam tabulasi di atas maupun menjawab kebutuhan internal lembaga terkait penyediaan database hakim, maka Beberapa cakupan quick wins yang relevan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

1. Percepatan penanganan laporan pengaduan dengan jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) hari kerja dari sejak registrasi.
⇒ **Mulai implementasi : Oktober 2015**
2. Penyediaan akses informasi langsung terkait tugas utama Komisi Yudisial pada bidang penegakan maupun pencegahan atau informasi lainnya secara cepat dan akurat berbasis TIK. Hal tersebut sejalan dengan tujuan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Komisi Yudisial 2015-2019.
⇒ **Mulai Implementasi : Januari 2016**

E. Langkah-Langkah Reformasi yang Akan Dilakukan

Reformasi bermakna sebagai perubahan dengan suatu loncatan yang sengaja dirancang untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Komisi Yudisial berupaya untuk mengintegrasikan proses reformasi ini agar sejalan dengan rencana strategis (Renstra) Komisi Yudisial yang telah dibuat dalam cakupan tahun 2015 s.d. 2019. Maka Berbagai bentuk perubahan yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial 2015-2019, antara lain:

Arah Kebijakan:

1. Penguatan sistem rekrutmen dan persiapan bakal calon Hakim Agung, Hakim di Mahkamah Agung dan hakim yang memiliki integritas dan kompetensi yang dipersyaratkan.



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

2. Membangun kesamaan persepsi antara DPR, MA, KY dan Lembaga terkait dalam hal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc*.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan yang berprespektif Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.
4. Mengupayakan pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim.
5. Mendorong disahkannya beberapa peraturan yang mendukung menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
6. Mendorong sistem dan operasionalisasi pengelolaan hakim sebagai pejabat negara.
7. Peningkatan efektivitas penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang didukung oleh sistem deteksi dini dan database hakim yang terintegrasi.
8. Penguatan partisipasi publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
9. Memperkuat peran penghubung dan jejaring Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap profesi hakim.
10. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi Komisi Yudisial.

Strategi:

Strategi dimaknai sebagai upaya terus-menerus untuk memperbaiki proses dan hasil yang merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai organisasi, kebijakan dan prioritas program-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan dengan dituliskan dalam rencana strategis Komisi Yudisial 2015 – 2019, maka secara umum strategi yang akan diambil oleh Komisi Yudisial terbagi menjadi dua bagian utama yaitu Strategi Eksternal dan Strategi Internal, berikut ini adalah detail cluster strategi serta upaya konkret yang coba digagas dalam menjalankan strategi tersebut:



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

1. Strategi Eksternal
 - a. Peran Pencegahan
 - 1) *Profiling* bakal calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
 - 2) Pembangunan basis data rekam jejak hakim yang terintegrasi.
 - 3) Upaya aktif peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
 - 4) Penyusunan konsep, mekanisme, dan instrumen pengaturan pengelolaan hakim sebagai pejabat Negara.
 - 5) Penyelenggaraan *judicial education*, pengelolaan isu publik, forum diskusi dan BAKOHUMAS, serta sosialisasi.
 - b. Peran Penegakan
 - 1) Reformasi proses penanganan laporan masyarakat yang cepat, mudah diakses dan berkualitas.
 - 2) Bersama Mahkamah Agung mendorong efektivitas sistem pengawasan dan monitoring tindak lanjut pelaksanaan usul penjatuhan sanksi.
2. Strategi Internal
 - a. Penguatan Lembaga
 - 1) Pelaksanaan reorganisasi lembaga.
 - 2) Peningkatan kinerja dan pengembangan SDM Komisi Yudisial.
 - 3) Penguatan pengawasan.
 - 4) Penguatan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi.
 - 5) Penataan hubungan kerja antara pimpinan dan anggota Komisi Yudisial dengan kesekjenan Komisi Yudisial.



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

b. Jaringan Kerjasama

- 1) Peningkatan kerjasama dengan berbagai lembaga.
- 2) Penguatan kordinasi dan kerjasama reguler antara DPR, MA dan KY.
- 3) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam menyiapkan bakal calon hakim potensial.
- 4) Pemetaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia peradilan melalui partisipasi publik.
- 5) Bersama mitra melakukan upaya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan *access to justice*.
- 6) Melakukan kordinasi dengan Mahkamah Agung dan melakukan advokasi kepada pemerintah dan DPR pada issue strategis

Komisi Yudisial secara kelembagaan masih memerlukan banyak pembenahan. Komisi Yudisial dituntut untuk terus mengembangkan organisasinya agar tujuan-tujuan yang hendak dicapai Komisi Yudisial bisa mudah direalisasikan. Sejauh ini Komisi Yudisial telah memiliki perangkat-perangkat organisasi seperti: Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Finansial; Pernyataan Visi, Misi, Komitmen Nilai dan Komitmen Moral; Struktur Organisasi beserta uraian tugas; Sistem Organisasi; dan Program dan Kegiatan. Keberadaan perangkat tersebut bagi Komisi Yudisial masih perlu untuk dioptimalkan jika menginginkan organisasi berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan-tujuannya bisa tercapai. Sehingga beberapa langkah perubahan yang akan dilakukan yang terbagi dalam 4 (empat) segmen dimana ruang lingkup 8 area perubahan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya dapat dilihat pada tabulasi berikut ini:


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019
Arah Pengembangan Periode 2015-2019

Arah Pengembangan	2015	2016	2017	2018	2019
Organisasi	1. Melakukan evaluasi organisasi Komisi Yudisial dengan menyusun metode, pengolahan dan analisis data evaluasi. 2. Melakukan analisis jabatan.	1. Menyusun kajian akademis perbaikan, dan penyusunan struktur organisasi: a. Melakukan kajian mendalam terkait kondisi eksisting struktur organisasi KY; b. Melakukan studi komparasi model ideal struktur organisasi sesuai tugas dan fungsi lembaga. c. Menyiapkan rancangan struktur organisasi dan tata kerja. d. Penyempurnaan tugas dan fungsi masing-masing struktur.	1. Adokasi dan public campaign bersama civil society, stakeholder KY dan lembaga-lembaga terkait perubahan UU KY. 2. Perubahan UU KY yang mengakomodir pembentukan kedeputan. 3. Penyusunan implementasi perubahan struktur organisasi dengan pembentukan peraturan tentang SOTK.	1. Penyempurnaan analisis jabatan 2. Penyempurnaan ketatalaksanaan 3. Capacity Building	Monitoring dan evaluasi struktur organisasi.
		2. Pengajuan Naskah Akademis reorganisasi (perubahan UU KY) ke DPR dan Kementerian RB			


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

Arah Pengembangan	2015	2016	2017	2018	2019
SDM 1. Menyusun pola pengembangan SDM (tugas belajar, jin belajar, analisa kebutuhan diklat) 2. Penyusunan sistem manajemen kinerja 3. Menyusun rancangan <i>grand desoin</i> manajemen SDM berbasis kompetensi 4. Evaluasi penilaian kinerja 5. Pengusulan Jabatan Fungsional Tertentu khas KY 6. Penataan Evaluasi Jabatan	1. Penyusunan pola rotasi dan promosi berbasis kompetensi 2. Penyusunan pola pengembangan SDM berbasis kompetensi 3. Evaluasi dan menyusun kembali Kode Etik Pegawai 4. Pembangunan Human Resource Information System yang terintegrasi 5. Pembuatan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	1. Pencanaan kebutuhan SDM sesuai organisasi baru/SOTK. 2. Penerapan pola rotasi dan promosi berbasis kompetensi 3. Monitoring dan evaluasi pola pengembangan SDM berbasis kompetensi 4. Pemanfaatan Human Resource Information System	1. Penyempurnaan pola pengembangan SDM berbasis kompetensi 2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan Human Resource Information System	Penerapan pengelolaan SDM berbasis kompetensi yang terdiri dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan, serta rotasi dan promosi (SDM)	
Tata Laksana 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP;	1. Melakukan proses bisnis Yudisial menyelarut. 2. Melakukan pemetaan proses bisnis berdasarkan tugas fungsi; 3. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan Bisnis Proses yang terintegrasi sesuai dengan hasil reorganisasi.	1. Melakukan evaluasi Komisi secara 2. Melakukan pemetaan proses bisnis berdasarkan tugas fungsi; 3. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan Bisnis Proses yang terintegrasi sesuai dengan hasil reorganisasi.	1. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan SOP yang terintegrasi sesuai hasil evaluasi dan reorganisasi. 2. Melakukan sosialisasi SOP. 3. Mengembangkan prosedur kerja yang berbasis IT (e gov) bekerjasama dengan unit IT	Mengembangkan sistem monitoring dan kontrol regular pelaksanaan proses bisnis dan SOP yang dilaksanakan oleh atasan langsung.	Melakukan evaluasi pelaksanaan proses bisnis, SOP dan prosedur kerja berbasis IT untuk menilai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

Arah Pengembangan	2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan/regulasi tentang pedoman tata kelola TI-KY sebagai landasan dalam melaksanakan operasional TI-KY; 2. Melaksanakan kajian dan desain proses bisnis dan SOP terintegrasi yang mencakup keseluruhan entitas 3. Perancangan sistem standar aplikasi terintegrasi 4. Penyusunan dokumen change management bidang teknologi informasi dan komunikasi; 5. Peningkatan aplikasi core yang terintegrasi, terotomatisasi, aman dan handal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan/regulasi pedoman tata kelola TI-KY 2. Penerapan manajemen perubahan bidang teknologi informasi untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program TI-KY 3. Menyusun bisnis proses dan SOP terintegrasi; 4. Perancangan enterprise architecture TI-KY 5. Peningkatan layanan operasional melalui penguatan sarana prasarana TI-KY sampai wilayah Penghubung KY 6. Penguatan Unit TI-KY melalui kajian struktur TI-KY yang ideal sesuai dengan tugas dan fungsinya; 7. Penyusunan pola peningkatan kapasitas SDM TI-KY; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan unit TI-KY yang mandiri dan ideal sesuai dengan kajian yang dilakukan; 2. Penyusunan Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan sebagai landasan dalam pembangunan DRC dan Mekanisme Backup sehingga dapat menjamin ketersediaan dan keamanan data hingga 20 tahun ke depan; 3. Optimalisasi sistem melalui implementasi enterprise architecture TI-KY; 4. Penyusunan sistem informasi 5. Pengembangan KY untuk membantu pimpinan melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan melalui data/informasi yang disediakan dalam sistem; 5. Pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan ulang data center KY sesuai standar baku yang ditetapkan; 2. Penyediaan sistem informasi data mining yang berfungsi untuk menggali data menjadi informasi yang berharga dan bermanfaat yang selama ini tidak diketahui secara manual dalam basis data; 3. Pembangunan sistem knowledge management sebagai sarana berbagi pengetahuan kepada entitas organisasi sehingga tercipta keseimbangan informasi dan tindakan/realisasi yang dilakukan yang dilakukan 4. Pembangunan sistem audit, risk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi selama program kerja 5 tahun; 2. Merancang cetak biru 2019-2024 sebagai pedoman tata kelola TI-KY dalam 5 tahun ke depan; 3. Menyusun roadmap TI-KY.


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

Arah Pengembangan	2015	2016	2017	2018	2019
			sistem <i>e-learning/Learning Management System</i> TI-KY yang berfungsi untuk mengelola aktifitas pembelajaran, termasuk memantau dan evaluasi pengaturan materi;	dan <i>compliance</i> untuk melaksanakan evaluasi secara berkala. 5. Pengembangan aplikasi core yang terintegrasi, terotomatisasi, aman dan handal;	



BAGIAN TIGA

KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Konsolidasi rencana aksi disusun untuk memperlihatkan keterkaitan kegiatan, prioritas pelaksanaan dan target penyelesaian program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2019. Secara garis besar, berikut kami tampilkan jadwal pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pada masing-masing area perubahan.

AREA PERUBAHAN: MANAJEMEN PERUBAHAN

<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang diperbaharui setiap tahun sejak tahun 2012. • Menyusun usulan dan <i>roadmap</i> reformasi birokrasi Komisi Yudisial 2012 - 2014 secara partisipatif. Usulan dan <i>roadmap</i> reformasi birokrasi Komisi Yudisial disusun dengan melibatkan unsur dari seluruh unit kerja yang ada di Komisi Yudisial. • Melakukan sosialisasi dan internalisasi <i>roadmap</i> reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada forum rapat kerja serta forum khusus, baik yang dipimpin oleh Ketua maupun Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial langsung untuk memberikan Arah Kebijakan Lembaga.
<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB secara berkesinambungan • Menyusun <i>roadmap</i> RB 2015-2019 yang sejalan dengan Renstra KY • Sosialisasi <i>roadmap</i> kepada seluruh pegawai KY • Membentuk <i>agent of change/role model</i> sesuai tujuan RB KY • Menyusun strategi perubahan pola pikir/budaya kerja yang lebih partisipatif • Pembentukan komite pengarah IT dan pedomannya


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

POKJA	Rencana Aksi	Pelaksana Biro/Pusat	Jadwal Pelaksanaan					Hal yang diperlukan
			2014	2015	2016	2017	2018	
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi blueprint IT Peningkatan infrastruktur IT Peningkatan pelayanan publik berbasis TIK 							
	<ul style="list-style-type: none"> Estimasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dari 2015 s.d 2019 							
	<ul style="list-style-type: none"> Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 							
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB secara berkesinambungan 2. Menyusun roadmap RB 2015-2019 yang sejalan dengan Renstra KY 3. Sosialisasi roadmap kepada seluruh pegawai KY 4. Membentuk agent of change/role model sesuai tujuan RB KY 5. Menyusun strategi perubahan pola pikir/budaya kerja yang lebih partisipatif 6. Pembentukan komite pengarah IT dan pedomannya 7. Implementasi blueprint IT 8. Peningkatan infrastruktur IT 9. Peningkatan pelayanan publik berbasis TIK 	Renki Renki Renki Biro Umum Biro Umum Palinfo Palinfo Palinfo Palinfo						Komitmen dari seluruh jajaran pimpinan untuk melaksanakan perubahan



AREA PERUBAHAN: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi serta Kompilasi seluruh instrumen regulasi yang telah dihasilkan sejak tahun 2005 s.d. 2014 yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) Peraturan Komisi Yudisial dan 31 (tiga puluh satu) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. • Identifikasi dan Pemetaan secara menyeluruh kepada seluruh instrumen regulasi yang memiliki relevansi dengan Komisi Yudisial dari mulai: UUD, Undang-Undang, Peraturan Bersama MA-KY, Peraturan KY, sampai pada Peraturan Sekjen KY, disertai dengan status akhir dari masing-masing regulasi tersebut baik yang masih berlaku, tidak berlaku, revisi, hingga pada kejelasan mengenai kebutuhan sinkronisasi maupun deregulasi antar sesama regulasi. • Integrasi atas prosedur Penyusunan Naskah Akademik dan <i>Position Paper</i> terhadap Peraturan Perundang-Undangan & Kerangka Acuan terhadap Peraturan Internal Komisi Yudisial untuk dijadikan pedoman dalam membuat draft aturan maupun dasar legitimasi akademik (dalam bentuk Naskah Akademik, Position Paper, atau Kerangka Acuan). • Penyamaan persepsi dan koordinasi dengan Mahkamah Agung melalui instrumen Peraturan Bersama MA-KY yang mengatur 4 (empat) hal penting, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Perba MA-KY No. 1/2012 ttg Seleksi Pengangkatan Hakim b. Perba MA-KY No. 2/2012 ttg Panduan Penegakan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim c. Perba MA-KY No. 3/2012 ttg Tata Cara Pemeriksaan Bersama d. Perba MA-KY No. 4/2012 ttg Majelis Kehormatan Hakim • Harmonisasi serta Deregulasi terhadap dua regulasi berupa Peraturan Komisi Yudisial (PerKY) yang relatif mengatur hal yang sama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Per KY No. 1/2011 ttg Pembentukan Ketua Bidang KYRI, dan b. Per KY No. 2/2011 ttg Wewenang & Tugas Ketua, Wakil Ketua, & Ketua Bidang KYRI <p>Keduanya dihapus dan digantikan oleh Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap semua peraturan produk KY secara bertahap dan berkesinambungan • Harmonisasi terhadap peraturan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan yang telah dilakukan


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

<ul style="list-style-type: none"> • Estimasi anggaran yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun sistem evaluasi pengendalian penyusunan peraturan di KY Rp.2.547.878.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) 							
<ul style="list-style-type: none"> • Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 								
POKJA	Rencana Aksi	Pelaksana Biro/Pusat	Jadwal Pelaksanaan					Hal yang diperlukan
Penataan Perundang-Undangan	1 Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap semua peraturan produk KY secara bertahap dan berkesinambungan 2 Harmonisasi terhadap peraturan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan yang telah dilakukan 3 Menyusun sistem evaluasi pengendalian penyusunan peraturan di KY	Renki						Koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan Biro/Pusat
		Renki						
		Renki						



AREA PERUBAHAN: PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Utama 2010-2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi organisasi tahun 2010 2. Restrukturisasi organisasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 3. Tindak lanjut pelaksanaan restrukturisasi organisasi sesuai Peraturan Pemerintah melalui penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 4. Pembentukan penghubung di 10 wilayah di Indonesia 5. Pembentukan dokumen Analisis Jabatan
<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penataan Organisasi/Reorganisasi KY <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi organisasi sesuai dengan mandat, tugas dan fungsi lembaga 2. Penyusunan kajian/naskah akademis dan rancangan perbaikan struktur organisasi 3. Melakukan Reorganisasi • Melakukan Penguatan Organisasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan analisis jabatan 2. Penyempurnaan analisis beban kerja 3. Penyempurnaan ketatalaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> • Estimasi Anggaran yang diperlukan 	<p>Rp.8.191.514.000,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah)</p>


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

• Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja										
No	Rencana Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Pelaksana Biro/Pusat	Alokasi Waktu	Jadwal Pelaksanaan				Hal yang diperlukan	
					2014	2015	2016	2017		2018
A	Penataan organisasi Komisi Yudisial	Adanya struktur organisasi yang sesuai dengan mandat, tugas dan fungsi lembaga	Renki Dan Pusat Analisis Dan Layanan Informasi	2015 s.d 2019						
1.	Evaluasi organisasi sesuai dengan mandat, tugas dan fungsi lembaga									
a.	1 Penusunan rencana kerja dan anggaran									
	2 Penetapan pelaksanaan evaluasi									
	3 Penetapan metode evaluasi									
	4 Penetapan instrumen pengumpulan data									
	5 data									
	6 Penetapan responden									
b.	Penetapan durasi waktu evaluasi									
	1 Pengumpulan bahan sekunder									
	2 Pelaksanaan survei									
	3 Wawancara mendalam dengan pegawai dan stakeholders									
c.	Implementasi									
	1 Penusunan metode pengolahan data									
	2 Melakukan penilaian									


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	3 Melakukan penilaian 4 Melakukan penilaian 5 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi								
2.	Penyusunan kajian/naskah akademis dan rancangan perbaikan struktur organisasi								
a.	Persiapan 1 Penyusunan rencana kerja dan anggaran 2 Penetapan pelaksanaan/penyusun 3 Penetapan durasi waktu penyusunan 4 Penentuan konsultan								
b.	Pelaksanaan 1. Pengumpulan bahan sekunder 2. Melakukan identifikasi dan analisis 3. Melakukan kajian teoritis dan empiris 4. Melakukan <i>Benchmarking</i> terhadap lembaga sejenis Komisi Yudisial								
c.	Implementasi 1. Menyusun dokumen kajian/naskah akademis 2. Menyusun rancangan perbaikan struktur organisasi								
3.	Melakukan Reorganisasi								
a.	Persiapan 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran 2. Penetapan pelaksana 3. Penetapan durasi waktu penyusunan 4. Penentuan konsultan								

REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015-2019 |

BAGIAN TIGA: KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

b.	Pelaksanaan 1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait atas hasil penyusunan kajian/haskah akademis 2. Penyelenggaraan diskusi publik 3. Pelaksanaan advokasi dan public campaign																			
c.	Implementasi 1. Memperoleh persetujuan Reorganisasi disertai dengan adanya dasar hukum (perubahan UU KY, Peraturan Pemerintah) 2. Penyusunan peraturan pelaksanaan atas organisasi baru 3. Sosialisasi UU dan peraturan Monitoring dan Evaluasi																			
d.	Monitoring dan Evaluasi 1. Pelaksanaan Monev 2. Pelaporan hasil monev																			

No	Rencana Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Pelaksana Biro/Pusat	Alokasi Waktu	Jadwal Pelaksanaan						Hal yang diperlukan		
					2014	2015	2016	2017	2018	2019			
B	Penguatan Organisasi	Tersedianya uraian jabatan dan uraian tugas, serta	Biro Renkri dan Biro Umum	2015 s.d 2019									
1.	Penyempurnaan Anjeb, ABK, dan												



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<p>Ketatalaksanaan</p> <p>a. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran 2. Penetapan pelaksana 3. Penetapan metode evaluasi 4. Penetapan durasi waktu penyusunan 5. Penentuan konsultan <p>b. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan bahan sekunder 2. Melakukan identifikasi, pemetaan dan analisis 3. Melakukan kajian teoritis dan empiris <p>c. Implementasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan penyempurnaan Anjab 2. Penyusunan penyempurnaan ABK 3. Penyusunan penyempurnaan tatatalaksana <p>d. Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Money 2. Pelaporan Hasil Money 																		
<p>proses bisnis dan SOP untuk menunjang pelaksanaan tugas yang efektif.</p>																			


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019
AREA PERUBAHAN: PENATAAN TATA LAKSANA

<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen <i>IT Blue Print</i> (Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial) sebagai pedoman tata kelola IT, baik dari sisi perencanaan, implementasi, pengembangan IT di Komisi Yudisial maupun kebutuhan anggaran tahun 2015-2019; • Pembangunan sistem keamanan dan <i>Backup Site</i> untuk seluruh perangkat <i>database</i> Komisi Yudisial yang terpisah pada daerah tertentu sesuai jarak standar yang aman; • Penggunaan sistem Informasi (IT) secara massif pada setiap proses kerja di lingkungan Komisi Yudisial yang didukung dengan Instruksi Sekretaris Jenderal No. 1 tahun 2014 tentang Pemanfaatan IT di lingkungan Komisi Yudisial; • Penerapan tata kerja <i>e-government</i> dengan memanfaatkan berbagai aplikasi sistem informasi terhadap banyak aspek bidang, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Community</i> Komisi Yudisial b. Sistem Informasi Gaji dan Tunjangan c. Penanganan Laporan Masyarakat d. Database rekam jejak hakim e. Perpustakaan online f. Seleksi Calon Hakim Agung <i>online</i> g. Sistem pelayanan informasi publik <i>online</i> h. <i>E-learning</i> Peningkatan Kapasitas Hakim i. Pengaduan <i>online</i> • Seluruh <i>business process</i> telah didukung oleh <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i>, yang mencapai tingkat kesesuaian hingga 76,8 % dengan standar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) berdasarkan hasil review Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun peraturan/kebijakan TIK yang mengacu pada cetak biru TIK KY 2015-2019, yang bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kontrol dalam pelaksanaan pengelolaan TIK, sehingga penyelenggaraan TIK menjadi optimal; - Adanya landasan dalam pelaksanaan TIK KY; - Adanya <i>Service Level Agreement</i> sebagai alat ukur pencapaian tingkat layanan fungsi TIK-KY; - Adanya <i>framework</i> yang dipakai untuk penyelenggaraan TIK berkelanjutan.

REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015-2019 |

BAGIAN TIGA: KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa pola kerja yang dilaksanakan di Komisi Yudisial telah sesuai dengan bisnis proses dan SOP yang berlaku dan berjalan secara terintegrasi, dilaksanakan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi bisnis proses dan SOP eksisting; - Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Setjen KY ke dalam SOP sesuai tupoksi unit kerja - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP - Menyusun metode evaluasi SOP terintegrasi - Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP - Pengembangan TI sesuai dengan dokumen cetak biru TI KY - Pengembangan aplikasi yang mendukung proses bisnis KY secara terintegrasi - Pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat secara terintegrasi - Pengembangan aplikasi yang bersifat transaksional secara terintegrasi - Melakukan <i>assessment</i> secara berkala terhadap sistem informasi yang ada • Pengembangan pusat sistem informasi berbasis TIK, sehingga tercipta <i>one stop service</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala melalui Tim PID KY; - Menyusun alur informasi yang terintegrasi; - Menyusun standar format Informasi; • Pengembangan layanan, infrastruktur dan aplikasi; <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun sistem keamanan yang multi layer; - Menyusun kebijakan dan SOP terkait operasi infrastruktur; - Adanya pemetaan dan peningkatan infrastruktur secara berkala; - Menyusun sistem uji keamanan secara berkala; - Memastikan pengembangan aplikasi telah sesuai dengan SDLC (<i>Systems Development Life Cycle</i>); • Pemanfaatan TIK sebagai bagian dari proses kerja organisasi; <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Sistem Informasi yang telah disusun unit TIK; - Menggunakan media komunikasi modern dalam melaksanakan komunikasi baik internal dan eksternal, contoh: penggunaan sms gateway dan community atau penggunaan email @komsiyudisial.go.id.
--	---


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ISO 27001:2013; 		<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) 								
<ul style="list-style-type: none"> • Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 		Rencana Aksi	Pelaksana Biro/Pusat	Jadwal Pelaksanaan						Hal yang diperlukan
POKJA				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyusun peraturan/kebijakan TIK yang mengacu pada cetak biru teknologi informasi dan komunikasi KY 2015-2019; 2 Memastikan bahwa pola kerja yang dilaksanakan di Komisi Yudisial telah sesuai dengan bisnis proses dan SOP yang berlaku dan berjalan secara terintegrasi <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi bisnis proses dan SOP eksisting - Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Seijen KY ke dalam SOP sesuai tupoksi unit kerja - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 	<p>Palinjo, Renki</p> <p>Renki</p> <p>Biro, Pusat</p> <p>Renki</p> <p>Renki</p> <p>Biro, Pusat</p> <p>Biro, Pusat</p>								<p>peneraan evaluasi berkala terhadap proses kerja dan tatalaksana KY</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun metode evaluasi SOP terintegrasi Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP 									


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<p>Infrastruktur secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun sistem uji keamanan secara berkala; - Memastikan pengembangan aplikasi telah sesuai dengan SDLC (Systems Development Life Cycle); <p>5 Pemanfaatan TIK sebagai bagian dari proses kerja organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Sistem Informasi yang telah disusun unit TIK; - Menggunakan media komunikasi modern dalam melaksanakan komunikasi baik internal dan eksternal, contoh: penggunaan sms gateway dan community atau penggunaan email @komisiyudisial.go.id. 	Biro, Pusat							
6	Penerapan ISO 270012013;	Biro, Pusat							



AREA PERUBAHAN: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan mesin <i>handkey</i> untuk mencatat kehadiran dan pemberlakuan pemotongan penghasilan atas keterlambatan dan kekurangan jam kerja pegawai sebagai upaya penegakkan disiplin pegawai. Hal ini telah secara efektif dilakukan sejak tahun 2008, sebelum kementerian/lembaga lain menerapkan reformasi birokrasi dan jauh sebelum Komisi Yudisial secara resmi mendapatkan tunjangan kinerja, langkah ini tetap menjadi salah satu keunggulan Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan disiplin SDM. • Seleksi calon pejabat struktural secara terbuka dimana salah satu tahapannya adalah asesmen psikologis telah dilakukan oleh Komisi Yudisial bahkan sejak awal berdirinya tahun 2006. Dalam perkembangannya, setelah disusunnya kamus dan standar kompetensi jabatan, seleksi pejabat tidak lagi menggunakan asesmen psikologis namun asesmen kompetensi, dan sejak tahun 2013 untuk tingkatan eselon I, II dan III Komisi Yudisial menjadikan hasil investigasi rekam jejak dan nilai wawancara sebagai bahan pertimbangan kelulusan untuk mendapatkan calon pejabat yang kompeten dan berintegritas. • Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang objektif, transparan dan terbuka melalui pendaftaran CPNS secara <i>online</i>, pelaksanaan tes kompetensi dasar menggunakan sistem <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> serta tes kompetensi bidang berupa asesmen psikologi lanjutan, <i>jobtest</i> dan wawancara. • Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pegawai secara proporsional. Disamping penegakan disiplin melalui pemotongan penghasilan sejak tahun 2008, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengeluarkan 4 sanksi disiplin untuk pegawai dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2014 yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> o Dua sanksi ringan berupa teguran lisan; o Satu sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil; o Satu sanksi berat berupa Pemberhentian Sementara dari Pegawai Negeri Sipil. o Tidak hanya menyoroti masalah disiplin pegawai, tahun 2013 Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memberikan penghargaan bagi dua orang pegawai (1 laki-laki dan 1 perempuan) dengan predikat "Pegawai Disiplin dan Berdedikasi".
<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi • Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan aplikasi pendaftaran pegawai Online • Pengembangan SIMPEG sebagai sistem monitoring dan evaluasi kinerja pegawai • Penyusunan naskah akademis JFT • Penyusunan pola karier pegawai sebagai dasar dalam redistribusi pegawai tahun 2015 • Penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai tahun 2015 • Penyusunan kebutuhan pegawai • Penyusunan peraturan tata cara seleksi calon pegawai Komisi Yudisial • Penyempurnaan standar kompetensi jabatan fungsional • Membuat Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi (<i>training need analysis</i>) • Penyusunan Pedoman Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tugas Belajar • Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang memadai • Penyelenggaraan <i>Capacity Building</i> Komisi Yudisial • Pembuatan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala • Menyusun pedoman seleksi jabatan struktural • Melakukan evaluasi dan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi • Sistem Penilaian kinerja Individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu • Penyempurnaan Capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja • Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik secara berkala • Penyempurnaan indikator pemberian penghargaan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi • Penyempurnaan evaluasi jabatan • Pemutakhiran data base pegawai secara berkala
<ul style="list-style-type: none"> • Estimasi anggaran 	Rp.11.805.170.000,00 (sebelas miliar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh juta rupiah)


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

• Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja		Rencana Aksi	Pelaksana Biro/Pusat	Jadwal Pelaksanaan					Hal yang diperlukan	
				2014	2015	2016	2017	2018		2019
POKJA Penataan Sistem Manajemen SDM	1	Melakukan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi	Biro, Pusat							Komitmen untuk memberdayakan SDM sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya, tidak berdasar subjektifitas
	2	Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja	Biro, Pusat							
	3	Penyempurnaan aplikasi pendaftaran pegawai Online	Palinfo							
	4	Pengembangan SIMPEG sebagai sistem monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	Palinfo							
	5	Penyusunan naskah akademis JFT	Biro Umum							
	6	Penyusunan pola karier pegawai sebagai dasar dalam redistribusi pegawai tahun 2015	Biro Umum							
	7	Penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai tahun 2015	Biro Umum							
	8	Penyusunan kebutuhan pegawai	Biro Umum							
	9	Penyusunan peraturan tata cara seleksi calon pegawai Komisi Yudisial	Biro Umum							
	10	Penyempurnaan standar	Biro Umum							

REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015-2019 |

BAGIAN TIGA: KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

**ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019**

11	kompetensi jabatan fungsional Membuat Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi (<i>training need analysis</i>)	Biro Umum							
12	Penyusunan Pedoman Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tugas Belajar	Biro Umum							
13	Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang memadai	Biro Umum							
14	Penyelenggaraan Capacity <i>Building</i> Komisi Yudisial	Biro Umum							
15	Pembuatan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Biro Umum							
16	Menyusun pedoman seleksi jabatan struktural	Biro Umum							
17	Melakukan evaluasi dan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi	Biro Umum							
18	Sistem Penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu	Biro Umum							
19	Penyempurnaan Capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	Biro Umum							
20	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik secara berkala	Biro Umum							


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	21	Penyempurnaan indikator pemberian penghargaan (reward) kepada seluruh unit organisasi	Biro Umum						
	22	Penyempurnaan evaluasi jabatan	Biro Umum						
	23	Pemutakhiran data base pegawai secara berkala	Biro Umum						

AREA PERUBAHAN: PENGUATAN PENGAWASAN

<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang terus dipertahankan dari sejak tahun 2007 s.d. 2014. • Penetapan program wilayah tertib administrasi dan wilayah bebas korupsi melalui Surat Keputusan Sekjen Nomor 107/KEP/SET.KY/03/2013 tentang Area Rawan Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial • Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penyusunan Laporan Periodik pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia berdasarkan PerSekjen KY Nomor 5 Tahun 2012. • Inisiatif lembaga untuk melakukan pengawasan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal serta berkomitmen untuk melanjutkan proses hukumnya kepada penegak hukum. • Identifikasi risiko untuk kegiatan pengawasan • Peningkatan kompetensi SDM Pengawasan (APIP) • Pencapaian laporan LHKPN dan LHKASN secara reguler yang diperuntukan bagi seluruh pejabat di Lingkungan Komisi Yudisial mulai Ketua, Wakil Ketua, Anggota KY, Sekretaris Jenderal, hingga Kepala Biro/Pusat.
--	--

REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015-2019 |

BAGIAN TIGA: KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Pelaporan gratifikasi secara konsisten kepada KPK terhadap pejabat dan/atau pegawai yang menerimanya 								
Agenda Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Peraturan tentang Pengendalian Gratifikasi dan melakukan sosialisasi • Penetapan Peraturan <i>Wistle Blowing System</i> dan melakukan sosialisasi • Penyusunan peraturan/pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan melakukan sosialisasi • Pencanangan Zona Integritas • Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) • Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi APIP • Membuat identifikasi dan daftar risiko pada unit kerja 								
Estimasi Anggaran	Rp. 7.601.171.000,00 (tujuh miliar enam ratus satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)								
Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja									
POKJA	Rencana Aksi	Pelaksana Biro/Pusat	Jadwal Pelaksanaan					Hal yang diperlukan	
Penguatan Pengawasan	1 Penetapan Peraturan tentang Pengendalian Gratifikasi dan melakukan sosialisasi	Renki							Komitmen pimpinan untuk menerapkan reward & punishment secara adil
	2 Penetapan Peraturan <i>Wistle Blowing System</i> dan melakukan sosialisasi	Renki							
	3 Penyusunan peraturan/pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan melakukan sosialisasi	Renki							
	4 Pencanangan Zona Integritas	Renki							
	5 Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Renki							


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WB3M)								
6	Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi APIP	Renki							
7	Membuat identifikasi dan daftar risiko pada unit kerja	Renki							

AREA PERUBAHAN: PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 sebagai langkah penyesuaian terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. • Pengelolaan akuntabilitas kinerja diawali dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 138/KEP/SET.KY/III/2012 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selain itu, Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi e-monev mengacu pada evaluasi dan pengukuran kinerja e-monev keluaran Bappenas. • Dokumen LAKIP Tahun 2013 mendapatkan nilai CC
<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hasil penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial • Dokumen LAKIP Komisi Yudisial mendapatkan Nilai B • Pembangunan sistem pengukuran kinerja berbasis e-system yang memberikan informasi akurat pencapaian sasaran dan target kinerja • Indeks persepsi korupsi mencapai indeks 4
<ul style="list-style-type: none"> • Estimasi Anggaran 	Rp. 31.279.788.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

• Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

No	Rencana Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Pelaksana Biro/Pusat	Alokasi Waktu	Jadwal Pelaksanaan						Hal yang diperlukan	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019		
A	Peningkatan Kualitas Hasil Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja KY	LAKIP Mendapatkan nilai B	Renki	2015 s.d 2019								1. Komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan sasaran dan target kinerja sesuai dengan Rencana, Renja, IKU dan PK. 2. Laporan periodik yang secara berkasanambungan disampaikan oleh BIP dengan disertai analisis pencapaian kinerja
1	Persiapan 1 Pembentukan tim 2 Penyusunan tugas dan tanggung jawab 3 Penyusunan rencana kerja dan anggaran											
2	Pelaksanaan 1 Mengumpulkan data/laporan kinerja dan melakukan analisa atas pelaksanaan program-											



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

<p>B</p> <p>3</p> <p>Implementasi Penyempurnaan Dokumen Akuntabilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menyusun penyempurnaan dokumen Renstra 2015-2019 dan dokumen IKU. 2 Menyusun PK setiap tahunnya 3 Menyusun LAKIP setiap tahunnya 4 Menyusun dan menyepakati pedoman pengukuran kinerja <p>C</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Money 5 Pelaporan Hasil Money 	<p>anggaran berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun dan disepakati (Renstra, Renja, IKU, PK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 FGD dengan stakeholder 3 Wawancara dengan pimpinan dan unit kerja terkait 4 Melakukan studi komparasi tentang program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berkualitas 										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

No	Rencana Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Pelaksana Biro/Pusat	Alokasi Waktu	Jadwal Pelaksanaan						Hal yang diperlukan
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
B 1	Pembangunan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis e-system Persiapan	Memberikan kemudahan dalam mengolah data pengukuran kinerja	Renki	2015 s.d 2019							
	1 Pembentukan tim										
	2 Penyusunan tugas dan tanggung jawab										
	3 Penyusunan rencana kerja dan anggaran										
2	4 Proses pemilihan konsultan										
	Pelaksanaan										
	1 Mengumpulkan data dan analisa kinerja KY										
B 3	2 workshop										
	3 Wawancara dengan pimpinan dan unit terkait										
	Implementasi										
	Implementasi Sistem										
	1 Pembentukan dan pembekalan penguji aplikasi										
	2 Sosialisasi dan internalisasi										
	3 Implementasi aplikasi e-system										

REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015-2019 |

BAGIAN TIGA: KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

C	Monitoring dan Evaluasi																	
4	Pelaksanaan Money																	
5	Pelaporan Hasil Money																	

AREA PERUBAHAN: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

<ul style="list-style-type: none"> • Capaian Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan Standar Penanganan Laporan Masyarakat melalui Pembentukan Pedoman Pelayanan pada seluruh tahapan penanganan mulai dari Penerimaan, Verifikasi - Anotasi, Pemantauan, Pemeriksaan, dan Persidangan. • Penguatan pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis IT yang cepat dan akurat terkait akses informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan penanganan laporan masyarakat dengan menerapkan sistem informasi yang telah disesuaikan dengan perubahan standar tata cara penanganan laporan masyarakat (Peraturan Komisi Yudisial No. 4 tahun 2013); b. Percepatan proses pendaftaran bakal Calon Hakim Agung dengan menerapkan sistem informasi melalui aplikasi Seleksi Calon Hakim Agung <i>Online</i>; c. Percepatan layanan informasi publik Komisi Yudisial dengan menerapkan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Aplikasi PPID <i>Online</i> yang telah disempurnakan Peraturan Komisi Yudisial nomor 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. Pada regulasi ini diatur mengenai pengkategorian informasi dari Komisi Yudisial yang dapat untuk diakses oleh publik. • Peningkatan Pelayanan Komisi Yudisial untuk mempermudah akses publik terhadap seluruh peran Komisi Yudisial melalui dibentuknya Kantor Penghubung pada 10 daerah, antara lain:
--	---


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medan untuk wilayah Sumut ▪ Palembang untuk wilayah Sumsel ▪ Pekanbaru untuk wilayah Riau ▪ Semarang untuk wilayah Jateng ▪ Surabaya untuk wilayah Jatim ▪ Samarinda untuk wilayah Kaltim ▪ Makassar untuk wilayah Sulsel ▪ Mataram untuk wilayah NTB ▪ Manado untuk wilayah Sulut ▪ Kupang untuk wilayah NTT
<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan instrumen regulasi dan kebijakan yang tegas dan jelas terkait Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan instrumen kebijakan Pusat (Peraturan KY atau Peraturan Sekjen KY); - Penyederhanaan SOP teknis pelayanan publik. - Aturan <i>Reward & Punishment</i> untuk penyelenggara layanan • Internalisasi budaya dan nilai-nilai pelayanan prima <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Penanaman nilai-nilai pelayanan prima kepada unit/petugas pelayanan; - Sosialisasi berkesinambungan terhadap nilai pelayanan prima kepada seluruh pegawai di KY. • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi ulang bentuk-bentuk pelayanan Komisi Yudisial RI; <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Inti <ul style="list-style-type: none"> a.1. Pelayanan Laporan Masyarakat a.2. Pelayanan Bidang Pencegahan (Calon Hakim Agung, Pelatihan Hakim, Advokasi Hakim) b. Pelayanan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> b.1. PPID b.2. Audiensi Stakeholder b.3. Website b.4. Perpustakaan c. Pelayanan Kerjasama dengan Mitra <ul style="list-style-type: none"> c.1. Penghubung c.2. Hubungan antar lembaga c.3. Unit Pengadaan Barang/jasa - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan; - Realisasi otomatisasi seluruh kegiatan pelayanan (pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pelayanan seperti:


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - e-learning, e-Library, Pengaduan Online, PPID online, dll); - Peningkatan skor kepuasan publik terhadap pelayanan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). • Realisasi konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan kebijakan khusus; - Pembuatan Sistem Aplikasi (Pelayanan Satu Pintu Online); - Penyiapan Infrastruktur (Fasilitas, SOP, dll); - Ketersediaan SDM (Assesment, Pelatihan, Penugasan); - Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. • Pengaturan mekanisme pengaduan terhadap pelayanan KY dan langkah tindak lanjutnya 																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Estimasi anggaran 	Rp. 52.868.477.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #cccccc;">POKJA</th> <th rowspan="2" style="background-color: #cccccc;">Rencana Aksi</th> <th rowspan="2" style="background-color: #cccccc;">Pelaksana Biro/Pusat</th> <th colspan="6" style="background-color: #cccccc;">Jadwal Pelaksanaan</th> <th rowspan="2" style="background-color: #cccccc;">Hal yang diperlukan</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">2014</th> <th style="background-color: #cccccc;">2015</th> <th style="background-color: #cccccc;">2016</th> <th style="background-color: #cccccc;">2017</th> <th style="background-color: #cccccc;">2018</th> <th style="background-color: #cccccc;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="background-color: #cccccc;">Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>1 Pembentukan instrumen regulasi dan kebijakan yang tegas dan jelas terkait Pelayanan Publik</td> <td>Sesjen</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- Pembentukan instrumen kebijakan Pusat (Peraturan KY atau Peraturan Sesjen KY);</td> <td>Biro/Pusat</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- Penyederhanaan SOP teknis</td> <td>Biro/Pusat</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	POKJA	Rencana Aksi	Pelaksana Biro/Pusat	Jadwal Pelaksanaan						Hal yang diperlukan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Pembentukan instrumen regulasi dan kebijakan yang tegas dan jelas terkait Pelayanan Publik	Sesjen								- Pembentukan instrumen kebijakan Pusat (Peraturan KY atau Peraturan Sesjen KY);	Biro/Pusat								- Penyederhanaan SOP teknis	Biro/Pusat							
POKJA	Rencana Aksi				Pelaksana Biro/Pusat	Jadwal Pelaksanaan						Hal yang diperlukan																																	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019																																					
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Pembentukan instrumen regulasi dan kebijakan yang tegas dan jelas terkait Pelayanan Publik	Sesjen																																											
	- Pembentukan instrumen kebijakan Pusat (Peraturan KY atau Peraturan Sesjen KY);	Biro/Pusat																																											
	- Penyederhanaan SOP teknis	Biro/Pusat																																											


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<p>pelayanan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan <i>Reward & Punishment</i> untuk penyelenggara layanan <p>2 Internalisasi budaya dan nilai-nilai pelayanan prima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Penanaman nilai-nilai pelayanan prima kepada unit/petugas pelayanan; - Sosialisasi berkesinambungan terhadap nilai pelayanan prima kepada seluruh pegawai di KY. <p>3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi ulang bentuk-bentuk pelayanan Komisi Yudisial RI; <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Inti <ul style="list-style-type: none"> a.1. Pelayanan Laporan Masyarakat a.2. Pelayanan Bidang Pencegahan (Calon Hakim Agung, Pelatihan Hakim, Advokasi Hakim) b. Pelayanan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> b.1. PPID b.2. Audiensi Stakeholder b.3. Website b.4. Perpustakaan c. Pelayanan Kerjasama dengan Mitra <ul style="list-style-type: none"> c.1. Penghubung 	<p>Biro Umum</p> <p>Biro/Pusat</p>		
--	--	------------------------------------	--	--


ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019

	<p>c.2. Hubungan antar lembaga</p> <p>c.3. Unit Pengadaan Barang/jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan; - Realisasi otomasi seluruh kegiatan pelayanan (pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pelayanan seperti: e-learning, e-Library, Pengaduan Online, PPID online, dll); - Peningkatan skor kepuasan publik terhadap pelayanan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 	<p>Biro Umum</p> <p>Palinfo</p> <p>Palinfo</p> <p>Biro/Pusat</p>	<p>Biro Umum</p> <p>Palinfo</p> <p>Biro/Pusat</p> <p>Biro/Pusat</p>
	<p>4 Realisasi konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyajian kebijakan khusus; - Pembuatan Sistem Aplikasi [Pelayanan Satu Pintu Online]; - Penyajian Infrastruktur [Fasilitas, SOP, dll]; - Ketersediaan SDM [Assesment, Pelatihan, Penugasan]; - Implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 		
	<p>5 Pengaturan mekanisme pengaduan terhadap pelayanan KY dan langkah tindak lanjutnya</p>		

**ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KOMISI YUDISIAL 2015 - 2019****BAGIAN EMPAT****PENUTUP**

Demikian Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial 2015 s.d. 2019, disusun untuk menjadi salah satu bahan acuan dalam menjalankan Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berharap melalui Reformasi Birokrasi ini akan tercipta birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional. Menyang tidak mudah menjalankan roda reformasi dalam suatu birokrasi, namun, melalui keterlibatan seluruh pihak, Komisi Yudisial yakin Reformasi Birokrasi bukan hanya slogan semata, namun sesuatu yang pasti dapat diwujudkan.

Jakarta, 2015

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Danang Wijayanto
NIP. 196204021982031001



LAMPIRAN:


**RENCANA AKSI PROGRAM
DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI**

JADWAL RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMIS YUDISIAL 2014 - 2019
(BIRO UMUM)

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	RMA KIL 2015	Jadwal Pelaksanaan					Keterangan
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pondasi Perundang-Undangan								
2	Penguatan Organisasi	1. Membentuk JFT sesuai core bisnis lembaga	Penyusunan JFT KY						
3	Peraturan Tatakelola	1. Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Selanjutnya ke dalam SOP sesuai aspek unit kerja 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 3. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP							
4	Peraturan Badan Manajerial SDM	1. Penyusunan rancangan akademis JFT 2. Penyusunan pola karier pegawai sebagai dasar dalam rekrutasi pegawai tahun 2015 3. Penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai tahun 2015 4. Penetapan kebutuhan pegawai 5. Penyusunan peraturan tata cara seleksi calon pegawai Komisi Yudisial 6. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan fungsional 7. Membuat kemitraan kebutuhan pengembangan kompetensi (training need analysis) 8. Penyusunan Pedoman Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tetap Besar 9. Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang memadai 10. Pengembangan Capacity Building Komisi Yudisial 11. Pambutan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berbasis 12. Menyusun pedoman seleksi jabatan struktural dengan kinerja organisasi 13. Melakukan evaluasi dan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi 14. Sistem Penilaian Kinerja Individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu 15. Penyempurnaan Capaian Kinerja Individu sebagai dasar untuk pemberian penghargaan kinerja 16. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin etika secara berbasis 17. Penyempurnaan indikator pemberian penghargaan (reward) kepada seluruh unit organisasi	Penyusunan Jabatan Fungsional Terumbu Penyusunan Pola Karier Pegawai Komisi Yudisial RMA KIL Subbag Hukum dan Organisasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dekat Jabatan: Dekat Kompetensi Teknis Dekat Soft Competence Rekrutmen dan Seleksi Pejabat Berbasis Kompetensi Evaluasi Penetapan PP 46 Tahun 2011 Evaluasi Penetapan PP 46 Tahun 2011 Penyempurnaan Evaluasi Jabatan						

No.	Area Perubahan	Rencana Awal	RKA K/L 2015	Jadwal Pelaksanaan						Keterangan
				2014	2015	2015	2016	2017	2018	
		18. Penyempurnaan evaluasi jabatan 19. Peningkatan daya kerja pegawai secara berkala	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							
5	Pengukuran Akuntabilitas									
6	Pengukuran Penguasaan									
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									

Mengesahkan :
Sekretaris Jenderal


Danang Wiljanto
NIP 19620402 198203 1 001

Kepala Biro Umum




Andi Djajal Latief
NIP 19590524 198803 1 860

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN TARGET RENCANA AKSI REFORMASI BIRUKRASI
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2014 - 2015
 (BIRO UMUM)

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan		Volume						Keterangan		
			Out Put	Satuan	2014	2015	2017	2018	2019				
1	Perataan Penunjang-Undegis												
2	Pengisian Organisasi	1. Membantu JFT sesuai core bisnis lembaga	Dikemuka penyelesaian Masjan terdapat isu-isu pembelajaran JFT KY	Dok		1							
3	Perataan Tataaksana	1. Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Serjen KY ke dalam SOP sesuai tuntutan unit kerja	Terkasukannya kegiatan penjabaran peta proses bisnis Serjen KY ke dalam SOP unit kerja	Kog		1	1	1	1	1	1		
		2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP	Terkasukannya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP	Kog		1	1	1	1	1	1		
		3. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP	Terkasukannya kegiatan tindak lanjut monitoring SOP	Kog		1	1	1	1	1	1		
4	Rencana Sistem Manajemen SDM	1. Penyusunan lachak akreditasi JFT	Nisiah Akreditasi jabatan Fungsional Tertentu	Dokumen		1							
		2. Penyusunan peta karier pegawai sebagai dasar dalam redimensi pegawai tahun 2015	Pedoman Peta Karier Pegawai	Dokumen		1							
		3. Penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai tahun 2015	Urutan Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja Pegawai	Dokumen		2							
		4. Penyusunan kebutuhan pegawai	Buizing Pegawai dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai	Dokumen		1	1	1	1	1	1		
		5. Penyusunan peraturan tata cara seleksi calon pegawai Komisi Yudisial	Pedoman Seleksi Calon Pegawai Komisi Yudisial	Dokumen		1							
		6. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan fungsional	Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Komisi Yudisial	Dokumen		1							
		7. Menawal identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi (training need analysis)	Laporan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai KY	Dokumen		1	1	1	1	1	1		
		8. Penyusunan Pedoman Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tugas Besar	Pedoman Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tugas Besar	Dokumen		1							
		9. Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang memadai	Laporan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Komisi Yudisial	Dokumen		1	1	1	1	1	1		
		10. Penyelenggaraan Capacity Building Komisi Yudisial	Laporan Capacity Building Komisi Yudisial	Laporan		1	1	1	1	1	1		
		11. Pembutan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Pedoman Monitoring dan Evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen		1							
		12. Menyusun pedoman seleksi jabatan struktural	Pedoman seleksi Calon Pejabat Struktural	Dokumen		1							
		13. Melakukan evaluasi dan antisipasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi	Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Individu	Dokumen		1	1	1	1	1	1		
		14. Sistem Penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu	Pedoman Penilaian Kinerja Individu	Dokumen		1							

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Satuan	Volume						Keterangan
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		15. Penyempurnaan Capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian penghargaan kinerja	Penilaian Sasaran Kerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
		16. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan dis periode etik secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi pelanggaran disiplin dan kode etik KY	Dokumen		1	1	1	1	1	
		17. Penyempurnaan indikator pemberian penghargaan (reward) kepada seluruh unit organisasi	Prosedur Pembinaan/penghargaan	Laporan		1					
		18. Penyempurnaan evaluasi jabatan	Berita Acara Validasi Evaluasi Jabatan	Dokumen		1					
		19. Pemutakhiran data base pegawai secara berkala	Daftar base pegawai Komisa Tradisional	data	150	200	225	250	275	275	
5	Penguatan Akuntabilitas										
6	Penguatan Pengawasan										
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										

Mengetahui :
 Sekretaris Jenderal

 Demang Wijayanto
 NIP 19620402 196203 1 001

Kapala BKO Umum

 Andi Djali Latief
 NIP 19590524 198903 1 039

JADWAL RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIKROWASI
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2014 - 2019
 (BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL)

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	RKA KI, 2015					Jadwal Pelaksanaan					Keterangan
			2014	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi rencana aksi tindak lanjut hasil FMP/PG secara berkala/bertahap 2. Menyusun roadmap RB 2015-2019 yang sejalan dengan Rencana KY 3. Sosialisasi roadmap kepada seluruh pegawai KY 4. Membentuk apar. of change/role model sesuai tujuan RB KY 5. Menyusun strategi perubahan pola pikir/budaya kerja yang lebih positif 											
2	Penataan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi, analisis dan pemecahan terhadap semua peraturan produk KY secara bertahap dan berkala/bertahap 2. Harmonisasi terhadap peraturan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan yang telah dilakukan 3. Menyusun sistem evaluasi/pengendalian penyusunan peraturan di KY 											
3	Pengaturan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi struktur organisasi yang akan dibentuk sesuai dengan model, tugas dan fungsi lembaga 2. Penyempurnaan tugas, fungsi dan struktur organisasi 3. Implementasi Budaya Organisasi 											
4	Penataan Tatakelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun metode evaluasi SOP 2. Melakukan perbaikan seluruh peta proses bisnis. Selanjut KY ke dalam SOP sesuai model unit kerja 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 4. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP 											
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi 2. Melakukan evaluasi/pengukuran kinerja individu di unit/kerja 											
6	Pengaturan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RPPJ dan Rencana 2015-2019, PK dan LAKIP 											Penyusunan RPPJ/Rencana : Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran KY Th 2015, Evaluasi Implementasi Program Kerja dan Anggaran Berdasarkan Rencana KY 2015-2019

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	RKA KL 2015	Jadwal Pelaksanaan					Keterangan
				2014	2015	2016	2017	2018	
		2. Persiapan pedoman pengukuran kinerja 3. Merancang sistem pengukuran kinerja berbasis e-system yang memberikan kemudahan dalam mengolah data pengukuran kinerja 4. Melakukan survey indeks prestasi kinerja							
7	Pengujian Pengawasan	1. Penerapan Peraturan tentang Pengendalian Gramkas dan prosedur sosial 2. Penerapan Peraturan Waste Browsing System dan melakukan sosialisasi 3. Penyusunan peraturan pedoman Penanganan Borturn Karyawan dan melakukan sosialisasi 4. Pengerjaan Zona digital 5. Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi AP/PP 6. Melakukan ujian untuk kegiatan pengujian 7. Melakukan identifikasi dan dasar risiko pada unit kerja	Pengembangan dan Penerapan SHP						
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								

Mengedahi :
Sekretaris Jenderal

Danaing Widyanto
NIP 19620402 196203 1 601

Kepala Biro Perencanaan dan Kespastihan Hakim



Rony Doffinus Telaak
NIP 19596702 198703 1 001

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan		Volume					Keterangan	
			Out Put	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1	Manajemen Perubahan	1. Melakukan evaluasi rencana aksi induk lanjut hasil PM/POD secara berkesinambungan 2. Menyusun roadmap RB 2015-2019 yang sejalan dengan Rencana KY 3. Sosialisasi roadmap kepada seluruh program KY 4. Membentuk agen of change/role model sesuai tujuan RB KY 5. menyusun strategi perubahan pola pikir/budaya kerja yang lebih partisipatif	Out Put	Lap Dok Keg Keg Dok	1 1 1 1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
2	Perubahan Peraturan-Undang	1. Identifikasi, analisa dan pemetaan terhadap semua peraturan produk KY secara bertahap dan berkesinambungan 2. Harmonisasi terhadap peraturan yang ada berdasarkan hasil analisis dan pemetaan yang telah dilakukan 3. Menyusun sistem evaluasi penguasaan penyusunan peraturan di KY	Out Put	Dok	1	2	2	3	3	3	
3	Penguatan Organisasi	1. Evaluasi struktur organisasi yang lebih dibentuk sesuai dengan rentas, misi dan fungsi lembaga 2. Penyempurnaan tugas, fungsi dan struktur organisasi 3. Internalisasi Budaya Organisasi	Out Put	Keg Dok Keg	1 1 1	1	1	1	1	1	
4	Perbaikan Tatakelola	1. Menyusun metode evaluasi SOP 2. Melakukan pemetaan seluruh peta proses bisnis sesuai KY ke dalam SOP sesuai jobdesc unit kerja 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dan elektivitas peta proses bisnis dan SOP 4. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP	Out Put	Dok Keg Keg Keg	1 1 1 1	1	1	1	1	1	
5	Peraturan Sistem Manajemen SDM	1. Melakukan sinkronisasi peraturan kinerja individu dengan kinerja organisasi 2. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja	Out Put	Keg Keg	1 1	1	1	1	1	1	
6	Perbaikan Akuntabilitas	1. Penyusunan RPPJ dan Renstra 2015-2019, PK dan LAPJ 2. Penyetaraan pelaporan pengakuan kinerja 3. Merancang dan mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis e-system yang memberikan kemudahan dalam melakukan data pengakuan kinerja 4. Melakukan survey Indeks persepsi korupsi	Out Put	Dok Dok Apresiasi Keg	1 1 1 1	2	2	2	2	3	

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan		Volume							Keterangan	
			Out Put	Satuan	2014	2015	2015	2017	2016	2015			
7	Penguatan Penguasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan tentang Pengendalian Gratifikasi dan melakukan sosialisasi 2. Penetapan Peraturan About Bowling System dan melakukan sosialisasi 3. Penyusunan peraturan/keputusan Perancangan Peraturan Kependidikan dan melakukan sosialisasi 4. Pencerangan Zona Integritas 5. Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi AHP 6. Identifikasi risiko untuk kegiatan pengawasan 7. Membuat identifikasi dan daftar risiko pada unit kerja 	<p>Diberikannya Peraturan Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Terlaksananya sosialisasi pengendalian gratifikasi</p> <p>Terlaksananya evaluasi pengendalian gratifikasi</p> <p>Diberikannya peraturan WBS</p> <p>Terlaksananya money WBS</p> <p>Diberikannya peraturan tentang pengawasan</p> <p>Terlaksananya money daftar risiko pada unit kerja</p>	Dok	1	1	1	1	1	1	1		
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik												

Menggetahui :
Sekretaris Jenderal

Kopala Biro Perencanaan dan Keputrahan Hakim




Rosy Delfinus Tulak
NIP 19550702 198703 1 001

Denang Wilayanto
NIP 19620402 198203 1 001

JADWAL RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2014 - 2019
 (BIRO INVESTIGASI)

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	RKA XIL 2015	Jadwal Pelaksanaan					Keterangan	
				2014	2015	2015	2017	2018		2019
1	Manajemen Perubahan									
2	Penataan Perundang-Undangan									
3	Penguatan Organisasi									
4	Penilaian Tatakelola	1. Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Sejen KY ke dalam SOP sesuai lokasi unit kerja 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 3. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP								
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Melakukan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi 2. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja								
6	Penguatan Akuntabilitas									
7	Penguatan Pengawasan									
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									

Mengetahui :
 Sekretaris Jenderal


 Kepala Biro Investigasi
 Danang Wiljanto

INDIKATOR KEBERHASILAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2014 - 2019
 (BIRO INVESTIGASI)

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan		Volume						Keterangan	
			Out Put	Satuan	2014	2015	2015	2017	2018	2019		
1	Manajemen Perubahan											
2	Pembatan Perundang-Undangan											
3	Penguatan Organisasi											
4	Pemraan Tatakelana	1 Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Satuan KY ke dalam SOP sesuai fungsi unit kerja 2 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 3 Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP	Teraksananya kegiatan penjabaran peta proses bisnis Satuan KY ke dalam SOP unit kerja Teraksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP Teraksananya kegiatan tindak lanjut money SOP	Keg	1	1	1	1	1	1		
5	Pemataan Sistem Manajemen SDM	1 Melakukan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi 2 Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja	Teraksananya kegiatan sinkronisasi kinerja individu dengan kinerja organisasi Teraksananya evaluasi pengukuran kinerja individu	Keg Keg	1	1	1	1	1	1		
6	Penguatan Akuntabilitas											
7	Penguatan Pengawasan											
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik											

Mengesahui :
 Sekretaris Jenderal

 Johannes Kwartanto

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

NO	URAIAN	RENCANA AKSI	RKA_KL 2015	PELAKSANAAN BIRO/PUSAT	TARGET OUTPUT	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan komite pengarah IT dan pedomannya Implementasi blueprint IT Peningkatan infrastruktur IT Peningkatan pelayanan publik berbasis TIK 	<p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p> <p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p> <p>Pengadaan server di Biro Umum</p> <p>Pengujian aplikasi core dan otomatisasi perkantoran</p> <p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p>	<p>Palinfo</p> <p>Palinfo</p> <p>Palinfo</p> <p>Palinfo</p>	<p>Dokumen</p> <p>New Inisiatif IKUR/KK/Opk</p> <p>Unit</p> <p>Laporan/Dokumen</p>						
2	Penilaian Tatakelola	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan TI sesuai dengan dokumen cetak biru TI KY Pengembangan aplikasi yang mendukung proses birokrasi secara terintegrasi Pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat secara terintegrasi Pengembangan aplikasi yang bersifat transaksional secara terintegrasi Melakukan assessment secara berkala terhadap sistem informasi yang ada Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala melalui Tim PID KY 	<p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p> <p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p> <p>PPID</p>	<p>Palinfo</p> <p>Palinfo</p> <p>Palinfo</p> <p>Palinfo/Renkus/Keuangan</p> <p>Palinfo</p> <p>Palinfo</p>	<p>Laporan/Dokumen</p> <p>Aplikasi</p> <p>Aplikasi</p> <p>Aplikasi</p> <p>Laporan/Dokumen</p> <p>Laporan/Dokumen</p>						
3	Peningkatan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> Penyempurnaan aplikasi pendaftaran pegawai Online Pengembangan SIMPEG sebagai sistem monitoring dan evaluasi kinerja pegawai 	<p>PPID</p>	<p>Palinfo</p> <p>Palinfo/Renkus/DM</p>	<p>Aplikasi</p> <p>Aplikasi</p>						
4	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> Merancang sistem pengukuran kinerja berbasis e-system yang memberikan kemudahan dalam mengolah data pengukuran kinerja 	<p>Penguatan aplikasi core dan otomatisasi perkantoran</p>	<p>Palinfo/Renkus</p>	<p>Aplikasi</p>						

Jakarta, Oktober 2014
Kepala Pusat Analisis dan Pelaporan Informasi



Roesli
NIP. 1952050211982031004

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

NO	URAIAN	RENCANA AKSI	RKA KL 2015	PELAKSANAAN BIRO/PUSAT	TARGET OUTPUT	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan komite pengarah IT dan pedomannya 2. Implementasi blueprint IT 3. Peningkatan infrastruktur IT 4. Peningkatan pelayanan publik berbasis IIK 	<p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p> <p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p> <p>Pengadaan server di Biro Umum</p> <p>Pengujian aplikasi core dan otomatisasi perkantoran</p> <p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p>	<p>Paifno</p> <p>Paifno</p> <p>Paifno</p> <p>Paifno</p>	<p>Dokumen</p> <p>New Insistif IKU/IKK/Isak</p> <p>Unit</p> <p>Laporan/Dokumen</p>						
2	Penatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan TI sesuai dengan dokumen cetak biru TI KY 2. Pengembangan aplikasi yang mendukung proses birokrasi secara terintegrasi 3. Pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat secara terintegrasi 4. Pengembangan aplikasi yang bersifat transaksional secara terintegrasi 5. Melakukan assesment secara berkala terhadap sistem informasi yang ada 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala melalui Tim PID KY 	<p>Monitoring dan evaluasi penerapan cetak biru IT KY</p>	<p>Paifno</p> <p>Paifno</p> <p>Paifno</p> <p>Paifno/Reknuk euangan</p> <p>Paifno</p> <p>Paifno</p>	<p>Laporan/Dokumen</p> <p>Aplikasi</p> <p>Aplikasi</p> <p>Aplikasi</p> <p>Laporan/Dokumen</p> <p>Laporan/Dokumen</p>						
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan aplikasi pendaftran pegawai Online 2. Pengembangan SIMPEG sebagai sistem monitoring dan evaluasi kinerja pegawai 	<p>PPID</p>	<p>Paifno</p> <p>Paifno/Reknus DM</p>	<p>Aplikasi</p> <p>Aplikasi</p>						
4	Pengujian Akumulabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang sistem pengukuran kinerja berbasis e-system yang memberikan kemudahan dalam mengolah data pengukuran kinerja 	<p>Pengujian aplikasi core dan otomatisasi perkantoran</p>	<p>Paifno/Rekn</p>	<p>Aplikasi</p>						

Jakarta, Oktober 2014
Kepala Pusat Analisis dan Pelayanan Informasi



Rowito
NIP. 1519052119820031004

JADWAL RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2014 - 2019
 (BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM)

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	RKA K/L 2015	Jadwal Pelaksanaan					Keterangan
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Manajemen Perubahan								
2	Penataan Perundang-Undangan								
3	Penguatan Organisasi								
4	Penataan Tatakelola	1. Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Sojen KY ke dalam SOP sesuai tupoksi unit kerja 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 3. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP							
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Melakukan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi 2. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja							
6	Penguatan Akuntabilitas								
7	Penguatan Pengawasan								
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								

Mengetahui :
 Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim



Heru Purnomo

Danang Wijayanto

**INDIKATOR KEBERHASILAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2014 - 2019
(BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI DAN PEMINGKATAN KAPASITA HAKIM)**

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan		Volume					Keterangan	
			Out Put	Selatan	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1	Manajemen Perubahan										
2	Pemetaan Perundang- Undang										
3	Penguatan Organisasi										
4	Pemetaan Tataletakana	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Seljen KY ke dalam SOP sesuai tupoksi unit kerja Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan SOP Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP 	<p>Teraksananya kegiatan penjabaran peta proses bisnis Seljen KY ke dalam SOP unit kerja</p> <p>Teraksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan SOP</p> <p>Teraksananya kegiatan tindak lanjut monitoring SOP</p>	Keg	1	1	1	1	1		
5	Pemetaan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sinkronisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja 	<p>Teraksananya kegiatan sinkronisasi kinerja individu dengan kinerja organisasi</p> <p>Teraksananya evaluasi pengukuran kinerja individu</p>	Keg Keg	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1		
6	Penguatan Akumulatifitas										
7	Penguatan Pengawasan										
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										

Menggetahui :
Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Hakim



Heru Purnomo

Danang Wijayanto

JADWAL RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIRUKRASI
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2014 - 2019
 (BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM)

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	RKA KIL 2015	Jadwal Pelaksanaan						Keterangan
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Manajemen Perubahan									
2	Penataan Penundang-Undangan									
3	Pengujian Organisasi									
4	Penataan Tatakelola	1. Melakukan perbaikan seluruh peta proses bisnis Seljes KY ke dalam SOP sesuai tupoksi unit kerja 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 3. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP								
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Melakukan sinergisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi 2. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja								
6	Penguatan Akuntabilitas									
7	Penguatan Pengawasan									
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									

Mengetahui :
 Sekretaris Jenderal

Danang Wijayanto

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim


 Ghani Roslaili

**INDIKATOR KEBERHASILAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIRUKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2014 - 2019
(BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM)**

No.	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan		Volume					Keterangan	
			Out Put	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1	Manajemen Perubahan										
2	Penataan Perundang-Undangan										
3	Penguatan Organisasi										
4	Penilaian Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penjabaran seluruh peta proses bisnis Setjen KY ke dalam SOP sesuai lokasi unit kerja 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 3. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SOP 	<p>Terlaksananya kegiatan penjabaran peta proses bisnis Setjen KY ke dalam SOP unit kerja</p> <p>Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP</p> <p>Terlaksananya kegiatan tindak lanjut money SOP</p>	Keg	1	1	1	1	1	1	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi 2. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu di unit kerja 	<p>Terlaksananya kegiatan sosialisasi kinerja individu dengan kinerja organisasi</p> <p>Terlaksananya evaluasi pengukuran kinerja individu</p>	Keg Keg	1	1	1	1	1	1	
6	Penguatan Akuntabilitas										
7	Penguatan Pengawasan										
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										

Mengetahui :
Sekretaris Jenderal

Danang Wiljayanto

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim


Ormi Rosleini